

PERAN BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

Siti Aisah Kabau
NPP. 29.1657

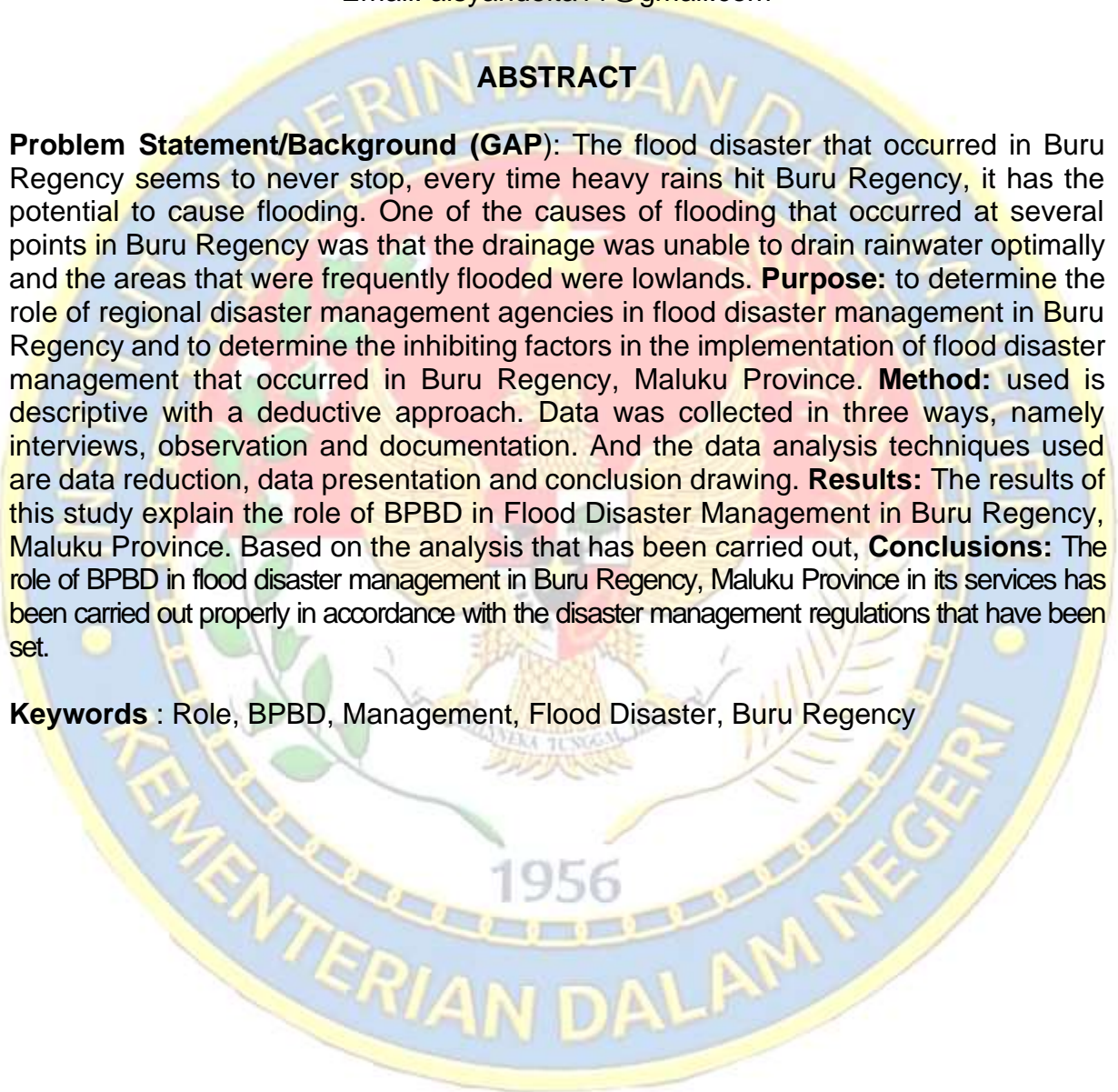
Asdaf Kabupaten Buru Provinsi Maluku
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email: aisyahdelta11@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The flood disaster that occurred in Buru Regency seems to never stop, every time heavy rains hit Buru Regency, it has the potential to cause flooding. One of the causes of flooding that occurred at several points in Buru Regency was that the drainage was unable to drain rainwater optimally and the areas that were frequently flooded were lowlands. **Purpose:** to determine the role of regional disaster management agencies in flood disaster management in Buru Regency and to determine the inhibiting factors in the implementation of flood disaster management that occurred in Buru Regency, Maluku Province. **Method:** used is descriptive with a deductive approach. Data was collected in three ways, namely interviews, observation and documentation. And the data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Results:** The results of this study explain the role of BPBD in Flood Disaster Management in Buru Regency, Maluku Province. Based on the analysis that has been carried out, **Conclusions:** The role of BPBD in flood disaster management in Buru Regency, Maluku Province in its services has been carried out properly in accordance with the disaster management regulations that have been set.

Keywords : Role, BPBD, Management, Flood Disaster, Buru Regency



ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Buru seolah tak pernah berhenti, setiap kali hujan lebat yang melanda Kabupaten Buru berpotensi menimbulkan banjir. Banjir yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Buru salah satunya disebabkan karena drainase tidak mampu mengalirkan air hujan secara maksimal serta daerah yang sering terkena banjir merupakan dataran rendah. Penelitian ini **Tujuan:** untuk mengetahui peran badan penanggulangan bencana daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Buru serta mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. **Metode:** yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan deduktif. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran dari BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik **Kesimpulan:** Peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Buru Provinsi Maluku dalam pelayanannya telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Peran, BPBD, Penanggulangan, Bencana Banjir, Kabupaten Buru



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Buru merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yang rawan akan terjadinya suatu bencana, terletak antara 2°25' LS dan 3°55' LS dan juga antara 125°70' BT dan 127°21' BT. Kabupaten Buru juga dibatasi oleh Laut Seram di bagian utara, Kabupaten Buru Selatan di sebelah selatan, Lautan Buru di bagian barat dan juga dibatasi oleh Selat Manipa di sebelah timur. Kabupaten Buru juga berada di antara tiga kota penting yang ada di Indonesia timur yaitu Makassar, Manado dan juga kota Ambon yang dilalui oleh *sea line* yang membuat letak dari Kabupaten Buru pada posisi yang strategis. Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2008 Tentang Kabupaten Buru yang menyatakan bahwa luas wilayah Kabupaten Buru yaitu 7.594,98 Km² dengan luas daratan 5.577,48 Km², luas lautan 1.972,5 Km², dan luas perairan 57,4 Km² dengan panjang garis pantai mencapai 232,18 Km².

Apabila dilihat secara geografis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi, Kabupaten Buru adalah wilayah rawan terjadinya bencana yaitu; bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana sosial yang dapat mengakibatkan korban jiwa, rusaknya suatu lingkungan, kerugian harta benda dan juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban yang terkena bencana, oleh sebab itu diperlukan upaya penanggulangan bencana oleh BPBD agar segala upaya penanggulangan tersusun secara sistematis, terencana, terkoordinasi, cepat, tepat dan terpadu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buru adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Buru dari tahun ke tahun adalah bencana banjir. Banjir ialah suatu peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan terendamnya suatu daerah atau wilayah di karenakan ukuran volume air yang meningkat. Penyebab bencana banjir bisa terjadi karena beberapa faktor baik itu curah hujan yang tinggi, penebangan pohon secara liar, meluapnya air di sungai atau kali, daerah yang memiliki dataran rendah, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan tempat tinggal dan faktor faktor lainnya yang dapat menyebabkan bencana banjir.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Bencana banjir hampir melanda seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buru terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kecamatan dengan intensitas banjir terbanyak yaitu Kecamatan Waeapo dengan jumlah kejadian sebanyak 16 kasus, sedangkan Kecamatan Waplau dan Kecamatan Liliy hanya terhitung 2 kasus saja semenjak tahun 2017-2021. Tercatat pada tahun 2017 Kabupaten Buru mengalami bencana banjir terparah akibat intensitas hujan yang tinggi dan jebolnya tanggul di beberapa desa yakni desa wayapo, desa waylata, desa waygeren, desa waytina dan desa waylo yang menyebabkan 16 desa dan dusun terendam, 1 orang meninggal dunia, 625 unit rumah terendam dengan tinggi permukaan air mencapai 20-200 cm dan sebesar 450 hektar lahan pertanian terendam akibat banjir yang meluap di beberapa daerah di Kabupaten Buru.

1.3. Penelitian Terdahulu

Peran Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2020 (Angrelia, C., Prihasta, R., Mubarak, A. C., & Utami, W. K. 2020) (Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi), Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Medan (Beong, S. dkk. 2018) (Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan. (Anggun, T., Putera, R. E., & Liesmana, R. 2020) (JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik), Peran Relawan Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud Di Kabupaten Blitar. (Anam, A. K., Jupriono, & Kasiati. (2018) (Journal of Borneo Holistic Health), Peran Stakeholder Dalam Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir. (Suleman, S. A., & Apsari, N. C. 2017) (Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Peran BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Siti Aisah Kabau 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

1. Kajian Peran Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2020.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah melalui BPBD dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kota Tangerang pada awal tahun 2020.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Tangerang telah melakukan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana banjir melalui kegiatan yang telah dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun yaitu : simulasi bencana, seminar dan pelatihan mengenai bagaimana cara menghadapi bencana banjir.

2. Kajian Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Medan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam (in depth interview). Studi dokumentasi dan studi kepustakawan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan BPBD dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di Kota Medan.

Hasil dari penelitian ini adalah BPBD Kota Medan dalam masalah penanggulangan bencana belum sepenuhnya maksimal, dikarenakan BPBD Kota Medan baru terbentuk kurang lebih satu tahun, dan ada beberapa faktor penghambat lainnya seperti sumber daya manusia yang masih kurang, persoalan koordinasi dengan beberapa instansi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, sarana prasarana yang belum memadai dan berbagai faktor-faktor penghambat lainnya.

3. Kajian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir yang terjadi di Kecamatan Padang Selatan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat sudah dilakukan oleh BPBD Kota Padang dan KBS (kota siaga bencana) akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal di karenakan tingkat ketergantungan masyarakat yang terlalu tinggi dan tupoksi KBS belum jelas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

4. Kajian Peran Relawan Dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud Di Kabupaten Blitar.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran relawan PMI dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Blitar pada saat tidak terjadi erupsi, saat terjadi erupsi dan pasca erupsi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 60% relawan PMI memiliki peran yang cukup dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Blitar.

5. Kajian Peran Steakholder Dalam Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dan kajian pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana Peran Steakholder Dalam Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran steakholder dalam manajemen penanggulangan bencana banjir dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BNPB, BPBD dan Instansi atau Lembaga Swadaya terkait yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1.5. Tujuan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Buru Provinsi Maluku
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
3. Untuk Mengetahui Apa Saja Upaya Yang Dilakukan BPBD Kabupaten Buru Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku

II. METODE

Para Dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori Dimensi Peran menurut (Soekanto 2002) tentang Hak dan Kewajiban :

1. Ketersediaan Anggaran, SDM dan Fasilitas
2. Melakukan Pencegahan Bencana, Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruks

Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tema penelitian. Diantaranya adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana.

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama nalisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangatlah penting dan dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tahapan penyelenggaraan bencana meliputi pencegahan bencana, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD berperan untuk melakukan perencanaan atau melakukan suatu upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana, melakukan serangkaian kegiatan tanggap

darurat pada saat terjadinya bencana serta melakukan perbaikan pasca terjadinya suatu bencana. Sehubungan juga dengan hal tersebut, maka BPBD tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka untuk meninjau atau mengetahui lebih jauh Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Buru, peneliti menggunakan indikator-indikator yaitu: Hak yang meliputi: (a) ketersediaan anggaran, (b) ketersediaan sumber daya manusia, (c) ketersediaan fasilitas. Indikator yang kedua yaitu: Kewajiban yang meliputi: (a) pencegahan bencana, (b) tanggap darurat, serta (c) rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pengkajian terhadap ke

1. Hak BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Buru Provinsi Maluku
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia
3. Ketersediaan Fasilitas atau Sarana Prasarana

⇒ **Kewajiban BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Buru Provinsi Maluku**

1. Pencegahan Bencana
2. Tanggap Darurat
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3.2 Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Buru Provinsi Maluku

Faktor Internal :

1. SDM dari personil terkait pelatihan penanggulangan bencana masih kurang.
2. Peralatan penanggulangan bencana masih kurang dari standarisasi peralatan yang semestinya.

Faktor External :

1. Masih kurangnya kesadaran warga untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya.
2. Faktor alam, karena daerah yang sering terkena banjir adalah dataran rendah.
3. Bangunan atau tanggul penahan banjir di beberapa lokasi rawan banjir belum sepenuhnya di bangun di karenakan anggaran yang terbatas.

3.3 Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah/lokasi rawan banjir termasuk pembentukan desa tangguh bencana.
2. Menyediakan fasilitas penampungan sementara bagi korban banjir berupa pos dan tenda evakuasi.
3. Menyiapkan perlengkapan dan peralatan yaitu rubber boat/speed boat dan pelampung serta melakukan evakuasi di 3 kecamatan rawan banjir yaitu waeapo, waelata dan lolongguba.
4. Menyiapkan personil di lokasi rawan banjir.
5. Menyiapkan buffer stock atau bahan makanan atau minuman dan keperluan logistik lainnya bagi korban banjir.
6. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam hal ini adalah Basarnas, BMKG, PMI, TNI, Polri dan instansi lainnya.
BPBD Kabupaten Buru juga melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada BNPB pusat dan di salurkan melalui BPBD provinsi terkait bantuan logistik yang bisa di terima oleh BPBD Kabupaten Buru.
7. Melakukan upaya normalisasi sungai dan membangun talit penahan tanah dan talit penahan air.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian saat ini, peneliti mengambil judul yaitu "Peran BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Buru Provinsi Maluku dalam pelayanannya telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan. Ini terlihat dalam peranan Pelaksana BPBD dalam menjalankan setiap penanggulangan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dan kajian pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana Peran Stakeholder Dalam Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran stakeholder dalam manajemen penanggulangan bencana banjir dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BNPB, BPBD dan Instansi atau Lembaga Swadaya terkait yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dijelaskan dalam BAB IV mengenai Peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Buru Provinsi Maluku, peneliti menyimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Buru Provinsi Maluku dalam pelayanannya telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan.
2. Ada beberapa faktor penghambat baik faktor internal maupun faktor external yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Buru, salah satu faktor utama adalah terkait SDM.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan lebih diharapkan juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih menjaga lagi lingkungan tempat tinggal atau lebih sering lagi di berikan sosialisasi terkait bencana agar masyarakat lebih paham lagi tentang bencana dan dapat bersama sama melakukan mitigasi bencana banjir serta diharapkan juga tidak ada program kerja yang tumpang tindih dan setiap bagian instansi di BPBD saling bantu dan bekerja sama sehingga pada akhirnya penanggulangan bencana banjir pun terlaksana dengan maksimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada BPBD beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Albi Anggito, Johan Setiawan. 2021. *Metodologi penelitian kualitatif* Retrieved September 8, 2021 from *Google Buku*. (n.d.)

Budi Supriyanto, ',2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*', Tangerang : Cv. Media Brilian.

Dharma Setyawan Salam, ',2004. *Manajmen Pemerintahan Indonesia*', Jakarta : Djambatan

Ermaya Suradinata, 1998. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Daerah Era Globalisasi*, Bandung: CV Ramadhan

Khambali, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, ed. By Putri Christian, 1st edn (Yogyakarta: Andi, 2007)

Kodoatie. J. Dan Sugiyanto. Ri, (2002). *Banjir*. Yogyakarta: PustakaBelajar.

Kuswara E, 2002. *Otonomi Daerah Untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta : Candi Cipta Piramida

Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Prof.Dr.Sugiyono. 2008.*Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan RdD*, Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

W. Riawan Tjandra. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

JURNAL&SKRIPSI :

Anam, A. K., Jupriono, & Kasiati. (2018). Peran Relawan dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Kelud di Kabupaten Blitar. *Journal of Borneo Holistic Health*, 1(2), 205–216

Anggun, T., Putera, R. E., & Liesmana, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*.

Angrelia, C., Prihastha, R., Mubarak, A. C., & Utami, W. K. (2020). PERANAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BANJIR TAHUN 2020. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*.

Astuti, A. M. (2014). *Analisis PEIL Kawasan Gondolayu Lor Berdasarkan Debit Banjir Sungai Code*. 6–21. <http://e-journal.uajy.ac.id/6254/>

Beong, S. dkk. (2018). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*

Fhadilla, N., & Skripsi, P. (2020). (*Bpbd*) *Dalam Penanggulangan Bencana*

Gitleman, L. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

lii, B. A. B. (2003). Bab iii landasan teori 3.1. *Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/7244/4/3TF03686.Pdf*, 2010, 15–48. <http://e-journal.uajy.ac.id/7244/4/3TF03686.pdf>

Ligal, S. (2008). *Pendekatan Pencegahan Dan Penanggulangan Banjir. Jurnal Dinamika Teknik Sipil*.

Suleman, S. A., & Apsari, N. C. (2017). PERAN STAKEHOLDER DALAM MANAJEMEN BENCANA BANJIR. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.

PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN :

UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Perka No 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah republik Indonesia no 21 tahun 2008 Tentang Penyelegaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Buru No 12 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana

SUMBER LAIN :

li, B. A. B., Geografi, A., Lokasi, K., & Wilayah, B. (2021). *Gambaran umum kondisi wilayah 2.1.2*, 1–85.

Pengertian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - GuruPPKN.com. (n.d.). Retrieved September 18, 2021, from <https://guruppkn.com/pengertian-pemerintah-pusat>

Sistem Penanggulanana Bencana Indonesia Halaman all - Kompas.com. (n.d.). Retrieved September 5, 2021, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/03/070000969/sistem-penanggulanana-bencana-indonesia?page=all>

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2018-2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buru

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Buru Tahun 2018-2022

